

Penulisan ini bertujuan mengkaji Kongres al-Islam di mana perbedaan doktrin keagamaan menjadi perdebatan antara Islam tradisional dan Islam modernis di Hindia Belanda yang terjadi antara tahun 1922-1926. Permasalahan perbedaan doktrin keagamaan ini kemudian berkembang menjadi perkara transnasional ketika terjadi gejolak politik di Timur Tengah yang mendorong diselenggarakannya Kongres Dunia Islam di Makkah dan Kongres Khilafah di Kairo. Dalam penelitian ini juga mengkaji dampak yang ditimbulkan dari perselisihan ideologi keagamaan kelompok-kelompok Islam dalam Kongres al-Islam di Cirebon dan dampak pergerakan politik Islam pada masa berikutnya. Untuk memperoleh jawaban di atas penulis menggunakan *Pendekatan Sejarah Sosial dan Pendekatan Pemikiran Hukum Islam (Fiqh)* untuk mengkaji aspek-aspek biografi, sosial, politik, dan pemikiran keagamaan yang melingkupi peristiwa Kongres al-Islam. Di samping itu, untuk membedakan masalah perbedaan doktrin keagamaan dan perkara khilafah penulis menambahkan pendekatan fiqh dalam kerangka metodologi.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peristiwa perdebatan doktrin keagamaan dalam Kongres al-Islam di Cirebon menjadi bibit perpecahan ideologi keagamaan antara Islam tradisional dan Islam modernis. Perpecahan ini berkembang lebih jauh ketika gejolak perkara khilafah di Timur Tengah menjadi instrument transnasionalisme bagi kelompok-kelompok Islam yang bersaing untuk memperoleh klaim legitimasi ideologi keagamaan mereka di Hindia Belanda. Dampak utama yang dihasilkan dari masalah perdebatan doktrin keagamaan dan persaingan klaim legitimasi dari Timur Tengah yang dibahas dalam Kongres al-Islam transnasional adalah pudarnya identitas Islam sebagai aspirasi politik kebangsaan digantikan dengan nasionalisme kebangsaan diletakan di atas primodalisme kedaerahan dan di atas politik populisme keagamaan.

Kata kunci: Sarekat Islam, Kongres al-Islam, Perdebatan Doktrin Agama, Persaingan Klaim Legitimasi

ABSTRACT

This writing aims to review the Al-Islam Congress who discussed the issue of differences in religious doctrine became debatable issue between traditionalist Islam and modernist Islam in the Dutch East Indies which occurred in period between 1922-1926. The problem with these different religious doctrines developed into a transnational case when there was political turmoil in the Middle East that encouraged the holding of the Muslim World Congress in Mecca and the Khilafah Congress in Cairo. This study also examines the impact who was arising from disputes over the religious ideology of Islamic groups in the Al-Islam Congress and the impact of political Islamic movements in the next period. To obtain the above answers the author uses the methodology of Social History and Islamic jurisprudence thought to investigate the aspects of biography, social, political, and religious thought that surrounds the events of the Al-Islam Congress. In addition, to dissect the issue of differences in religious doctrine and khilafah problem the author adds the fiqh approach in a methodological framework.

The results obtained in this study are the events of the debate religious doctrine in the Al-Islam Congress is the initial seeds of the split of religious ideology between traditionalist Islam and modernist Islam. This split developed further when the turmoil of khilafah cases in the Middle East became an instrument of transnationalism for Islamic groups whom both party were competing for claims of legitimacy of their religious ideology in the Dutch East Indies. The main impact resulting from the issue of debate religious doctrine and competition for claims religious legitimacy from the Middle East who discussed at the transnational al-Islam Congress is the fading of Islamic identity as national political aspirations replaced by nationalism on political regionalism and above the politics of religious populism.

Keywords: Sarekat Islam, Al-Islam Congress, Debate on Religious Doctrine, Competition for Claims Religious Legitimacy.